



universitas
MALIKUSSALEH

Jurnal SUJWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Vol. XIII, No. 2, Agustus 2015

Alamat:

Universitas Malikussaleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe

Aceh - Indonesia

P.O. Box 141, Telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450



Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. XIII, No. 1, April 2015

- Penasehat:** *Rektor Universitas Malikussaleh*
- Penanggung Jawab:** *Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Ketua Dewan Redaksi:** *M. Husen MR, SP., MA*
- Wakil Dewan Redaksi:** *Muhammad Fazil, S.Ag., M.Soc.Sc*
- Sekretaris Redaksi:** *Ade Muana Husniati, S.Sos., M.Si*
- Bendahara:** *Ainol Mardhiah, S.Ag., M.Si*
- Anggota Dewan Redaksi:** *Dr. Muhammad Bin Abubakar, M.A*
Nur Hafni, S.Sos., MPA
Deddy Satria M, S.Sos., M.Si
Agung Utama Lubis, S.Sos., M.Si
Fajri, S.PdI., M.Soc.Sc
- Redaksi Pelaksana:** *Iskandar Zulkarnaen, SE., M.Si, Ph.D*
Muntasir, S.Ag., M.A, Ph.D
T. Alfiady, S.Sos., MSP
Zulham, BA., M.A
Mauludi, S.Sos., MSP
Amiruddin Ketaren, S.Sos., M.Si
Maryam, S.Sos., MSP
- Editor Ahli:** *Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid*
Prof. Dr. Badaruddin Rangkuti
Prof. Dr. Alo Liliweni, M.Si
Prof. Dr. Syihabbuddin, M.Si
Prof. A. Hadi Arifin, M.Si
Dr. Suwaib, M.Si
Dr. Muklir, S.Sos., SH., MAP
Dr. M. Nazaruddin, M.Si
Dr. Nirzalin, M.Si
Dr. Rasyidin, S.Sos., MA
Dr. Alwi Budiman, S.Sos., M.Si
Dr. Saifuddin, MA
- Staf Tata Usaha:** *T. Deni Saputra*

Alamat:
Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe
P.O. Box 141, telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450

Terbit 3 kali setahun, sejak 2003



universitas
MALIKUSSALEH

Jurnal SUWA terbit 3 kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember. Didistribusikan pada kantor-kantor: lembaga penelitian, kampus-kampus pemerintah sipil dan militer, kedutaan besar asing, LSM dalam dan luar negeri.

SUWA diterbitkan dengan tujuan ikut mengembangkan ilmu-ilmu sosial dan politik. Oleh karena itu, redaksi menerima sumbangan artikel, kolom, hasil penelitian, maupun tinjauan buku (book review). Tulisan tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi.

Khusus tinjauan buku: tentang ilmu-ilmu sosial dan politik. Buku yang dikaji berlaku bagi buku yang diterbitkan 2 tahun terakhir untuk terbitan dalam negeri dan 5 tahun terakhir untuk terbitan luar negeri.

Naskah diserahkan kepada redaksi sebanyak 2 berkas dengan format program MS-Word atau RTF spasi rangkap, di atas kertas HVS kuarto dengan panjang karangan maksimal 4.000 kata. Pengiriman naskah disertai dengan Softcopy dalam CD.

Semua catatan dalam artikel hendaknya tersusun rapi dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku. Catatan kaki agar ditulis di bagian bawah halaman dan tidak pada bagian belakang artikel. Daftar pustaka agar dibuat menurut abjad nama pengarang dengan contoh sebagai berikut:

Geertz, C.

1984 "Tihingan: Sebuah Desa di Bali", dalam Koentjaraningrat (ed.) Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 246-274.

Koentjaraningrat,

1974 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Manoppo-Watupongoh, G.Y.J.

1995 "Terorisme: Perspektif dari Indonesia", *SUWA* 1(1):6-21.

Sertakan nama lengkap, organisasi/institusi, biodata singkat, alamat, dan nomor telepon/fax/e-mail.

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. XIII, No. 2, Agustus 2015

Daftar Isi

Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadi Teroris di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ilmu Politik <i>Dr. Rasyidin, S.Sos., MA</i>	139-152
Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah <i>Sufi, S.Sos., MAP & Maryam, S.Sos., MSP</i>	153-164
Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd <i>Ti Aisyah, S.Sos., MSP</i>	165-176
Benturan Antar Mazhab dan Melemahnya Pemerintahan Lokal di Aceh <i>Dr. Alwi, S.Sos., MA</i>	177-192
Kajian Representasi Heroisme Melalui Film (Studi Film-Film Heroisme Negara <i>Super Power</i> Amerika) <i>Kamaruddin Hasan, S.Sos., M.Si & Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP</i>	193-207
Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Puskesmas Kuta Makmur Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara <i>Ahmad Yani, S.Sos., M.Si</i>	209-228
Pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kecamatan Aceh Utara) <i>Nurfatini, S.Sos., M.Si & Elpa Sissuarni</i>	229-255
Konglomerasi Industri Perfilman Di Indonesia <i>Cindenia Puspasari, S.IP., M.Soc.Sc</i>	257-565
Riwayat Hidup Penulis	266

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADI TERORIS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU POLITIK

Oleh : Dr. Rasyidin, S.Sos., MA

Abstrak

Pengaruh terorisme dapat menghancurkan fisik maupun non fisik Negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga faktor terjadi terorisme di Negara ini, faktor kemampuan system politik yang dijalankan tidak mampu mengolah sumber daya alam dan menempatkan sumberdaya manusia secara signifikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Faktor kedua dalam perspektif ilmu politik adalah pemerintah Masih terdapat kegagalan dalam menjalankan berbagai aktivitas kenegaraan, sehingga tidak mampu memberikan yang terbaik untuk Negara ini, Di samping itu faktor yang lain adalah adanya konspirasi penguasa dan aparat Negara yang menyuburkan terorisme dalam Negara. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan kemampuan system politik ekstraktif yang dimilikinya, kegagalan pemerintah pada masa lalu menjadi pengalaman perlu diperbaiki secara mendalam dan sungguh-sungguh disegala bidang. Di samping itu, konspirasi penguasa dan aparat perlu diminimalisir secara berkelanjutan dan signifikan. Apabila hal-hal tersebut dapat dijalankan Negara dengan baik dan bijaksana, maka aktivitas kaum teroris dapat dikurangi secara signifikan di Negara Republik Indonesia.

Key Word : faktor-faktor yang mendorong terorisme

Pendahuluan

Berbicara tentang teroris seluruh masyarakat dunia baik di Negara maju, Negara berkembang maupun Negara terbelakang tidak asing lagi bagi masyarakat tersebut. Apabila teroris tersebut dianalisis dalam konteks Indonesia, maka terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang khusus dan dapat menimbulkan berbagai kerugian terhadap Negara baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dampak kerugian secara fisik bisa dikalkulasikan dengan nilai tertentu, namun kerugian non fisik tidak dapat diperkirakan dengan apapun termasuk dengan mata uang. Setelah terjadi pergelokan reformasi politik pada tahun 1998 dan pergantian rezim pemerintahan di Indonesia, seiring dengan itu telah terjadi sejumlah peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme, sehingga menimbulkan berbagai kecemasan, ketakutan, kekuatiran, mengganggu keamanan dalam negeri dan lain seumpamanya. Aktivitas terorisme di Indonesia telah berlangsung secara kontinyu dari tahun 2000 sampai dengan 2011 secara kuantitatif berjumlah lebih dari dua puluh tindakan terorisme di Indonesia.

Seluruh aktivitas teroris secara umum juga berpengaruh kepada gender, diakui atau tidak, pemberitaan tentang teroris yang ditayangkan oleh media baik cetak maupun elektronik telah menyedot perhatian kaum wanita. Apalagi penayangan tentang terorisme dan penangkapan orang-orang yang dituduh "teroris" disampaikan hampir setiap saat oleh hampir semua stasiun televisi. Bahkan diolah sedemikian rupa sehingga drama penangkapan teroris terkesan bak telenovela yang menarik untuk ditonton. Satu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, kejadian penangkapan teroris ternyata muncul di tengah banyaknya isu yang tengah menimpa negeri ini. Mulai dari kasus impor daging sapi dengan aktornya Ahmad Fathanah bersama para wanita cantik di sekelilingnya, hingga isu kenaikan BBM. Benar kiranya dugaan banyak orang selama ini bahwa terorisme sengaja dimunculkan untuk pengalihan isu seperti yang terjadi saat ini. Apabila dicermati lebih dalam semua kasus terorisme, sebenarnya memiliki efek dan akibat yang sangat mengkuatirkan terhadap semua orang atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan menjadi semakin berat dan sulit dengan adanya terorisme yang mencuat di negeri ini.

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideologi yang berlandaskan faham-faham barat yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, dan dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, dengan prinsip mati satu tumbuh seribu.

Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Daru segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untk melaksanakan aktifitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan "iming-iming" yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal tersebutpun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini.

Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan pengaruh psikologis terhadap generasi muda dari bangsa ini. Labilnya emosi para remaja membuat doktrin-dotrin tentang separatisme menjadi lebih mudah dimasukan kedalam pikiran mereka. Adanya ajaran-ajaran baru yang negatif yang sampai saat ini membuat para generasi muda semakin kebingungan untuk menentukan jalan hidup mereka, karena para remaja cenderung memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan mudah "cepat dan mudah untuk masuk surga".

Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena pendekatan ini sesuai dengan pendapat Lawrence W. Neunan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dengan memberikan arti pada data yang diperoleh, mengubah atau membuat data-data yang tersebut, agar dapat dimengerti.

Pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang fenomena faktor-faktor yang mendorong timbulnya teroris di Indonesia. Meskipun dalam penelitian ini, dilakukan melalui kajian pustaka sebagai kerangka pemikiran, landasan teori dalam kerangka pemikiran ini lebih dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai pembahasan hasil penelitian. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan terbitan lainnya seperti media internet serta makalah-makalah seminar, juga berita yang terdapat dalam media cetak seperti Koran dan majalah-majalah populer.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah: Faktor-faktor apa yang mendorong munculnya teroris di Indonesia jika ditinjau dari perspektif ilmu Politik ?

a. Pengertian Teroris

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center (WTC)* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai "September Kelabu", yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung *Pentagon*.

Terorisme memiliki sejarah yang sangat panjang, ini berkaitan dengan revolusi Perancis, namun istilah terorisme pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk kepada pengertian terror yang dipergunakan dalam menjalankan kebijakan teror yang dipakai oleh *Robespierre* untuk mempertahankan pemerintahan republican Perancis yang masih amat muda pada saat itu. Disamping itu pemerintahan kaum Jacobins dalam Revolusi Perancis dengan bangga menamakan dirinya sebagai kaum teroris (Lucas, 1993).

Katateroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin '*terrere*' yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata 'teror' juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian dihati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada defenisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah "*terorisme*" merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan

mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli yang menekuni bidang terorisme.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh (Arismunandar 1994 : 88) terorisme adalah aksi-aksi yang dilakukan dan berkembang menjadi suatu system mengeksploitasi rasa ngeri/getar manusia terhadap kekerasan fisik dengan maksud menimbulkan perasaan tidak berdaya atau memancing tindak balas yang dapat mencetuskan situasi dan menguntungkan bagi kelompok teroris (huru hara sosial, pemberontakan dan revolusi).

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa: terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Menurut T.P. Thornton (1964) terorisme dapat didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang dan dibuat untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut pendapat Muladi (2002 : 169) bahwa bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut

1. Sebelum Perang Dunia II, hamper semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai "terorisme negara". Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.

3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah "terorisme media" berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Dalam mendefinisikan terorisme, memang agak kesulitan karena berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mencakupi bentuk terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.

Menurut F.Budi Hardiman dalam Ewit Soetriadi (2008) bahwa (*political violence*) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Menurut F. Paul Wilkinson (2003 : 4) bahwa pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang.
4. Target aksiteror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuan demi agama dan kemanusiaan.

Dalam pandangan Amerika Serikat bahwa teroris dimaknai dengan beragam pengertian atau definisinya sehingga pemahamannya dikalangan mereka aatau waraganegara Amerika Serikat juga berbeda-beda :

Menurut *United States Central Intelligence* (CIA). Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/ atau organisasi Internasional yang diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing. Manakala menurut *United States Federal Bureau of Investigation* (FBI), Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harga untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, masyarakat sivil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik. Hal yang berbeda juga disebutkan oleh *United State Departement of State and Defense* Terorisme adalah kekerasan bermotif politik

dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok sub nasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.

The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998) Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

Apabila mengikuti pengertian yang disampaikan oleh *Conventiono The organization of The Islamic Conference on Combating International Terrorism*, 1999, makaterorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

Menurut *Webster's New World College Dictionary* (1996) Terorisme adalah *"the use of force or threats to demoralize, intimidate and subjugate"* Doktrin membedakan terorisme dalam dua macam definisi yaitu: definisi tindakan terrorism (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorism actor*), Sehingga terorisme merupakan tindakan-tindakan yang memiliki elemen :a). kekerasan, b). tujuan politik dan c). terror/intended audience.

b. Pengertian Politik

Politik apabila dilihat secara Etimologis berasal dari perkataan "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata yang lain seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut.

Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari "POLITIK" ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai *rules* agar kebahagiaan bersama didalam masyarakat disebuah Negara tersebut lebih mudah tercapai.

Mengikuti pendapat Harold D. Lasswell dalam Damsar (2010 : 10) dinyatakan bahwa politik adalah siapa yang mendapatkan, kapan dan

bagaimana. Sedangkan James A. Caporaso politik adalah pemerintahan, public, dan alokasi nilai-nilai oleh pihak yang berwenang.

Istilah politik yang dinyatakan oleh K. Ramanathan (2001 : 25) politik bukan hanya digunakan untuk menandakan sesuatu jenis aktivitas, namun istilah politik juga digunakan untuk menjelaskan kajian aktivitas tersebut. Politik adalah sebagai suatu kajian untuk menguraikan, menganalisis dan menerangkan aktivitas politik dan unsure-unsur yang mempengaruhi terjadinya suatu keputusan politik.

c. *Pengertian Sistem Politik*

Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan antara satu sama lain, baik bergantung secara fungsional yang mempunyai batas-batas tertentu namun merupakan suatu komponen yang terintegrasi secara baik. Oleh karena itu apabila komponen tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik, maka harus memiliki kapabilitas yang saling mendukung sebagai sebuah system yang kuat.

Menurut David Easton dalam Arifin Rahman (2002 : 4) system politik *The political system are allocated value (by means of politic); 2). The allocations are authoritative, and. 3). Its authoritative allocations are binding the society as a whole.* Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh ingkah laku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara authoritative kepada masyarakat. Menurut Sumantri dalam Arifin Rahman (2002 : 5) sistem politik adalah perlembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur politik dan inprastruktur politik.

Setiap system politik di dunia ini memiliki kapabilitas atau kemampuan system politik, dengan adanya kapabilitas tersebut maka system politik memiliki *basic mentality* yang kokoh dalam mengurus negara. Adapun kapabilitas tersebut adalah :

- 1) *The extractive capability* yaitu : kemampuan untuk mengexpoler sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- 2) *The regulative capability* yaitu : kemampuan untuk mengontrol perilaku individu dan kelompok yang berada dalam system politik.
- 3) *The distributive capability* yaitu : kemampuan untuk mendistribusi barang, jasa, kehormatan dan status kepada warganegaraanya secara adil tanpa diskrimitif.
- 4) *The symbolic capability* yaitu : kemampuan untun menunjukkan symbol-simbol yang akan dalam system politik baik di lingkungan domestic maupun lingkungan internasional.
- 5) *The responsive capability* yaitu : kemampuan dayan tanggap yang berasal dari input dan output politik dalam suatu system politik.

- 6) *Domestic and international capability* yaitu : kemampuan untuk menunjukkan kemampuan dalam lingkungan internal maupun di lingkungan internasional.

Kesemuaan kemampuan system politik tersebut di atas, merupakan instrument terpenting dalam mengurus negara, apabila tidak dapat dijalankan dengan baik, maka dengan sendirinya akan muncul berbagai persoalan dalam negara termasuk demonstrasi, distrust dan teroris dalam negara tersebut.

Pembahasan.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan melalui penelaahan dari berbagai sumber, maka telah didapatkan beberapa hal yang signifikan tentang tumbuh dan berkembangnya teroris di Indonesia. Teroris terjadi diberbagai belahan dunia, terutama di Negara-negara berkembang atau Negara dunia ketiga seperti Indonesia. Hal ini terjadi karena ada faktor-faktor penyebabnya sehingga teroris dengan leluasa terjadi di Negara-negara tersebut. Dalam pandangan ilmu Politik dalam analisisnya ditemukan beberapa faktor diantaranya.

- a) --- *Kapabilitas Ekstraktif belum optimal dijalan:*

Kapabilitas atau kemampuan sistem politik sangat menentukan dalam menjaga keamanan dan kesehatan manajemen Negara, Negara merupakan organisasi terbesar, maka diperlukan manajemen yang mampu memuaskan keinginan warganya. Kapabilitas system politik Ekstraktif merupakan kemampuan pemerintah untuk melakukan pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kemampuan pengolahan sumber daya alam biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian dipergunakan secara maksimal oleh pemerintah, dan hasil pengelolaan tersebut didistribusikan kepada daerah dan warganya secara tidak diskriminatif. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dengan sendirinya akan menjadi modal domestik yang akan dipergunakan sebagai alat kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu kemampuan ini juga dipergunakan untuk mengelola sumber daya manusia secara berkualitas dan berdaya saing, hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan, peningkatan sumberdaya, pengalokasian sumber daya manusia dan lain-lain seumpamanya. Apabila pengelolaan kedua sumber daya ini dilakukan secara adil tanpa diskriminatif sedikitpun, maka kesehatan dan kemaslahatan manajemen pemerintah sebagai sistem politik akan bekerja secara maksimal.

Dalam konteks kekinian kemampuan ekstraktif sistem politik di Indonesia belum mampu diolah untuk mensejahterakan masyarakat atau warganegaranya, walaupun ekspolasi bahkan eksploitasi terjadi dimana-mana, masyarakat masih saja bergumul dengan kemelataran dan kemiskinan.

Kemampuan ini juga memiliki fungsi untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara maksimal, namun masih banyak tenaga kerja yang handal tidak dimanfaatkan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, karena proses rekrutmen politik yang tidak profesional bahkan cenderung emosional yang dipertontonkan.

Ketika kemampuan ini tidak bisa dijalankan secara baik, maka pandangan ilmu politik merupakan salah satu alat pemicu teroris baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini sangat erat dengan faktor ekonomi dan faktor geopolitik dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak dikelola secara profesional, sehingga berpengaruh kepada kondisi (*human capital*). Menurut

Ehrlich dan Liu (2002) faktor geopolitik, khusus dalam kasus Negara kaya yang berusaha mengendalikan sumber daya alam di Negara berkembang misalnya gas dan minyak bumi yang diolah oleh perusahaan-perusahaan dari Negara maju, tidak diperuntukkan kepada Negara penghasil secara seimbang, bahkan mengeksploitasi sumber daya di Negara berkembang yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Di samping itu, Faktor-faktor sosioekonomi misalnya kemiskinan, ketidakadilan dan pengangguran, ini semua menjadi sumbangsih dalam mendorong atau memicu terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia, Ini merupakan pembuktian teori yang dinyatakan oleh Benmelech, Berrebi dan Klor (2010) bahwa tingkat pengangguran dan kondisi ekonomi yang buruk memungkinkan organisasi terror untuk merekrut teroris yang lebih berpendidikan, dewasa dan berpengalaman.

b) Implikasi kegagalan pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia dianggap gagal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, menegakkan legitimasi hukum dan menepati janji pada saat kampanye. Ketika political marketing diprogramkan berbagai rencana politiknya, namun setelah memperoleh tujuan politiknya tidak dapat direalisasikan secara signifikan kepada konstituennya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Hidayat dan Pirous (2011) menyatakan bahwa masih tumbuhnya kegiatan terorisme di Indonesia, antara lain karena pemerintah dianggap gagal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, melakukan penegakan hukum, dan memenuhi janji-janjinya semasa kampanye atau pada saat mereka melakukan *political marketingnya*.

Di samping itu, munculnya tindakan teroris di Indonesia merupakan implikasi dari tidak beresnya kondisi bangsa saat ini yang membuat banyak orang yang kecewa atau prustasi. Ini terbukti dengan adanya beberapa parameter atau indikator politik dan ekonomi, di antaranya terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merajalela dan telah merambah ke berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum mereka juga menginjak-nginjak hukum seperti yang dilakukan oleh Ketua Majelis Konstitusi (MK) Akil Muchtar. Ekonomi rakyat yang semakin sulit dan terdesak, jaminan

keamanan untuk masyarakat semakin rendah, para pemimpin pemerintah tidak lagi mampu memberi teladan dan panutan yang baik kepada warganegara, buruknya moral para wakil rakyat dalam menjalankan aktivitasnya bahkan konspirasi global yang merugikan bangsa atau ummat tertentu seperti konspirasi zionis, konspirasi organisasi (NGO) internasional dan lain seumpamanya. Indikator-indikator tersebut menjadi tanda-tanda atau muncul anggapan bagi sebagian masyarakat bahwa Indonesia saat ini telah menjadi *failed states*) di beberapa bidang tertentu atau bidang yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kegagalan pemerintah dihubungkan dengan kondisi sosioekonomi yang buruk, hubungan kedua faktor ini dan saling melengkapi satu sama lain. Peluang ini memungkinkan terwujudnya terorisme secara sistematis di Indonesia atau di Negara-negara lain di dunia ini.

c) *Konspirasi penguasa dan aparat*

Selain dua faktor tersebut diatas, bahwa terorisme di Indonesia dalam kaca mata ilmu politik merupakan rekayasa penguasa belaka. Dimana politik dan pemerintah yang berperan aksi-aksi terorisme dalam negeri. Pemerintah baru berhasil mengatasi terorisme di Indonesia, namun disisi lain pemerintah belum berhasil mencegah tindakan terorisme dalam bentuk deradikalisasi Hal tersebut mendorong pemerintah untuk merangkul organisasi yang mendukung fluralisme dan memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa kekerasan dan kekacauan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Dengan demikian peran tokoh masyarakat, NGO, masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menghapuskan atau meminimalis paham-paham yang radikal di dalam masyarakat umum.. Ilmu Politik menilai bahwa terorisme masa sekarang merupakan *feed back* pada masa lampau (masa Orde baru), mengingat aparat keamanan menjadi target serangan teroris, namun disisi lain juga muncul anggapan bahwa teroris di Indonesia ada keterlibatan Negara dalam aksi teroris tersebut. Dalam perjalanan sejarah di Indonesia, terdapat hubungan antara skenario pertahanan dan keamanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan politik penguasa.

Argumen bahwa ada keterlibatan Negara dalam kegiatan teroris di Indonesia terdapat dalam Film "*Inside Indonesia's war and terror*" Film ini diproduksi oleh dateline SBS (*Special Broadcasting Service*) sebuah televetion telivi terkenal di Negara Australia dan film tersebut ditayangkan pada tanggal 12 Oktober 2005. Film documenter tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas aksi terror dan kerusuhan antar agama di Indonesia adalah proyek Negara yang melibatkan Negara. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ada suatu konspirasi politik penguasa dibalik aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka yang tergolong dalam faktor-faktor yang mendorong terjadinya gerakan teroris di Indonesia paling tidak ada tiga penyebabnya yaitu :

- a. Kapabilitas sistem politik ekstraktif Negara belum bisa berjalan secara efektif, sehingga banyak persoalan-persoalan pokok belum dapat dipecahkan secara signifikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga kemampuan untuk mengeksplor sumber daya manusia dan sumber daya alam belum mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.
- b. Terjadinya terorisme di Negara Republik Indonesia juga dipicu oleh kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan legitimasi hukum secara komprehensif di negara ini.
- c. Konspirasi penguasa dan aparat juga mendorong terjadi terorisme di Negara ini, terjadi teroris ada permainan penguasa dan aparat pemerintah Indonesia, sehingga terorisme tidak bisa dibantas secara sungguh-sungguh dan tuntas. Setiap terorisme yang terjadi adalah proyek Negara yang melibatkan oknum-oknum tertentu.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian ini menyarankan kepada pemerintah agar dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

- a. Diharapkan pemerintah republic Indonesia agar melakukan peningkatan kemampuan ekstraktifnya secara signifikan disegala bidang tanpa diskriminatif sedikitpun, kemampuan mengelola SDM dan kemampuan mengeksplor SDA perlu ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh dan dilakukan secara berkesinambungan.
- b. Kegagalan pemerintah supaya diperbaiki secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai keperluan warganegara baik dalm bentuk public good maupun privat good. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah perlu dikoreksi secara optimal
- c. Konspirasi penguasa dan aparat diharapkan perlu diminimalisir atau dikurangi secara serius, dengan demikian aktivitas terorisme dapat berkurang dan kekacauan dalam negarapun dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Pemerintah perlu merangkul seluruh warganegara dan pemeluk agama secara adil dan bijaksana, bukan memukul dan menyingkirkan mereka, perlu ditempuh langkah-langkah persuasive dan humanitis.

Daftar Pustaka

- A.Rahman. H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Arismunandar, Satrio. *Terorisme, Kekerasan dan posisi gerakan Islam di Timur Tengah*. Jurnal Islamika Nomor 4, April-Juni 1994.
- Atmasasmita, Romli. 2005, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bandung: Putra Baru.
- Baskoro Suryandriyo 2010. <http://www.ikerenki.com/2014/01/pengertian-politik-makna-definisi-umum.html>
- Benmelech, E., Berrebi, C., & Klor, E.F. 2010. Economic Conditions and The Quality of Suicide Terrorism. *NBER Working Paper* No. 16320. August 2010.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenaka Media Group.
- Ehrlich. P.R., & Liu J. 2002. Some Roots of Terrorism. *Population and Environment*, Vol. 24.
- Johanan. 2009. Materi Kuliah. <http://materikuliah-makkiselaludihati.blogspot.com/2011/06/terorisme-di-indonesia>. Html (diakses pada tanggal 16 Oktober 2013).
- Lucas, Henry S. 1993. *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Muladi, 2002. *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, No.2 (Nov. 2002) hal 183-192
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Purwanato, H, Wawan. 2004. *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*. Jakarta : Grafindo
Ramanathan. K. 2001. *Asas Sains Politik*. Selangor Darul Ehsan, Kum-Vivar
Printing Sdn. Bhd.

Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia, Dalam perspektif Struktural
Fungsional*. Surabaya : SIC.

Thornton. T.P, 1964. *Terror as a weapon of political Agigation (From Internal War-
Problem and Approaches*. USA : Free Press.

OO000O